**Bab IV**

**Analisis Isu-isu Strategis**

Analis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan.

Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar Pemerintah Daerah senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 5 (lima) tahun yang akan datang, diidentifikasi dengan baik, maka pemerintahan daerah akan dapat mempertahankan/ meningkatkan pelayanan pada masyarakat. Pemerintahan daerah yang tidak menyelaraskan diri secara sepadan atas isu strategisnya akan menghadapi potensi kegagalan dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggungjawabnya atau gagal dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Karakteristik suatu isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembangaan/keorganisasian dan menentukan tujuan di masa yang akan datang. Isu-isu strategis di Kota Cirebon dirumuskan berdasarkan permasalahan pembangunan daerah, tantangan dan potensi pembangunan daerah ke depan, yang meliputi aspek fisik dan lingkungan, sosial budaya, ekonomi keuangan, dan aspek pemerintahan.

**4.1 Permasalahan Pembangunan**

Permasalahan pembangunan di Kota Cirebon dijabarkan berdasarkan kondisi umum yang telah disampaikan dalam bab II serta perkembangan atau evaluasi atas target-target kinerja RPJMD sebelumnya. Permasalahan yang disampaikan merupakan pekerjaan rumah yang menjadi fokus pelaksanaan pembangunan periode 2013 – 2018.

* + 1. **Aspek Fisik dan Lingkungan.**
* Kota Cirebon memiliki letak geografis yang sangat strategis. Berada di persimpangan jalur Jawa Barat dan Jawa Tengah, dilalui oleh jalur lintas nasional dan menjadi pusat pertemuan / titik simpul seluruh moda transportasi. Sebagai konsekuensi letak geografis tersebut kapasitas infrastruktur yang ada menjadi tidak sebanding dengan beban yang terjadi. Sehingga saat ini sudah terasa bertambahnya titik-titik kemacetan terutama di lintasan-lintasan sebidang jalur kereta api, selain itu jumlah jalan dengan kondisi rusak pun semakin bertambah. Fenomena commuter Cirebon – Jakarta semakin hari semakin tinggi, hal ini dipicu dengan semakin membaiknya pelayanan dan infrastruktur jalur kereta api lintas pulau Jawa. Waktu tempuh pun semakin singkat, dan bukan tidak mungkin Kota Cirebon menjadi pilihan utama mereka yang bekerja di Jakarta untuk bertempat tinggal di Kota Cirebon. Sementara untuk transportasi massal masih mengandalkan moda angkutan kota yang jumlahnya cenderung tetap.
* Kota Cirebon merupakan merupakan kota pantai yang menjadi ujung sebagian aliran sungai-sungai di wilayah Cirebon. Sebagai kota pantai, kondisi kemiringan lereng sangat landai dan hal ini menyebabkan air larian cenderung lambat. Dengan bertambahnya fenomena pemanasan global dan terjadinya kerusakan di wilayah hulu terutama di sekitar Gunung Ciremai, banjir dan genangan hujan menjadi permasalahan yang kemudian muncul. Kondisi ini ditambah dengan berkurangnya daerah resapan karena pesatnya pembangunan fisik serta keberadaan ruang terbuka hijau yang semakin hari semakin jarang.
* Terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah hulu sungai (sekitar Gunung Ciremai) serta berkurangnya daerah resapan ternyata berpengaruh pula pada tingginya sedimentasi di wilayah pantai Kota Cirebon. Di sisi lain fenomena ini menambah luas fisik wilayah kota tetapi pada sisi lain dijadikan tambahan lahan untuk pembangunan perumahan liar. Kondisi ini menyebabkan lingkungan di sekitar pantai cenderung tidak tertata, kumuh, dan merusak ekosistem pantai. Dampak yang kemudian terjadi adalah semakin jauhnya wilayah penangkapan ikan para nelayan Cirebon, hal ini disebabkan karena habitat ekologis tempat berkembang biak hewan laut menjadi hilang atau rusak.
* Kota Cirebon telah memiliki dokumen perencanaan tata ruang melalui Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cirebon 2011- 2031. Peraturan daerah ini masih dalam tahap baru dan pada saat RPJMD ini disusun sedang dilakukan penyusunan Rencana Detil Tata Ruang. Yang kemudian menjadi permasalahan bahwa dokumen ini belum cukup dijadikan acuan karena masih ada beberapa peraturan perundangan sebagai tindak lanjut perda tersebut yang belum disusun, sebagai contoh terkait dengan aturan pengenaan sanksi administratif pelanggaran tata ruang dan pengenaan insentif dan disinsentif tata ruang. Selain itu dalam pelaksanaannya diperlukan konsistensi dan komitmen dalam penegakan hukum. Untuk itu, diperlukan sinergitas antara pemerintah, masyarakat dengan komunitas pemerhati penataan ruang yang didukung oleh transparansi informasi terkait penataan ruang.
* Kota Cirebon memiliki luas wilayah administratif yang relatif sempit dibandingkan dengan kota-kota lainnya di Propinsi Jawa Barat. Dengan kondisi ini salahsatu permasalahan yang terkait ketersediaan lahan adalah keberadaan Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPA). Kapasitas dan daya tampung fasilitas tersebut akan berakhir dan harus segera digantikan dengan fasilitas baru dengan sistem sanitary landfill. Sementara dengan perkembangan kegiatan kota yang sangat pesat dan jumlah penduduk yang bertambah maka volume sampah yang dihasilkan pun meningkat pula. Pola inovasi dan pengembangan pengelolaan sampah baru pernah dilakukan di beberapa lokasi misal dengan pencanangan “zero waste” di beberapa kantor instansi pemerintah dan di beberapa komunitas perumahan. Namun hal tersebut belum cukup karena program yang ada cenderung sporadis, belum masif dan belum menjadi prioritas. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diperkirakan keberadaan tempat pembuangan akhir sampah masih sangat dibutuhkan, namun karena Kota Cirebon tidak memiliki lahan yang mencukupi maka satu-satunya pilihan adalah dengan menggunakan lahan di wilayah kabupaten/kota lain di sekitar Kota Cirebon.
* Keberadaan Pelabuhan Cirebon dipandang sebagai salahsatu fasilitas yang sangat strategis karena hanya satu-satunya di wilayah pantai Utara khususnya Jawa Barat bagian timur. Sebelum transportasi darat berkembang pesat seperti saat ini, arus barang dan penumpang yang keluar masuk pelabuhan Cirebon termasuk cukup tinggi. Namun seiring dengan perkembangan transportasi darat yang semakin maju, keberadaan pelabuhan cirebon sebagai moda transportasi barang dan penumpang sedikit demi sedikit mulai berkurang. Saat ini pelabuhan masih digunakan sebagai transit barang / kapal laut serta lebih diutamakan untuk pengangkutan batu bara sebagai bahan bakar industri di wilayah Bandung dan sekitarnya. Akibat perkembangan tersebut jalur transportasi Cirebon – Bandung menjadi lebih cepat rusak karena dimuati oleh beban yang berlebih, belum dampak dari debu batubara yang mencemari lingkungan sekitar pelabuhan dan kawasan permukiman di wilayah tersebut. Waktu tempuh jalur Cirebon – Bandung pun menjadi lebih lama.

**4.1.2 Aspek Sosial Budaya**

* Dari aspek pendidikan, Kota Cirebon sebenarnya berada di posisi teratas dibandingkan dengan wilayah lainnya di Cirebon. Angka rata-rata lama sekolah Kota Cirebon hampir mencapai sepuluh (10) tahun. Anggaran pendidikan dalam APBD telah mencapai hampir 32 persen dari total belanja. Namun dalam perjalanan apa yang menjadi target (angka indeks pendidikan) belum dapat tercapai. Angka putus sekolah yang ditargetkan untuk nol atau tidak ada anak putus sekolah masih belum tercapai. Biaya operasional sekolah baru bisa ditanggulangi APBD hanya sampai tingkat SMP saja, sementara untuk tingkat SMA belum dapat ditanggulangi oleh APBD. Akibatnya masih banyak anak putus sekolah di tingkat SMA. Selain itu permasalahan lainnya di bidang pendidikan adalah persoalan penerimaan siswa didik baru, pemerataan jumlah murid di sekolah-sekolah, sebaran fasilitas sekolah dan mutu guru.
* Di bidang kesehatan, Kota Cirebon memiliki indeks kesehatan yang paling tinggi di wilayah Cirebon. Anggaran kesehatan dalam APBD untuk kesehatan dasar dan rujukan sudah lebih dari 10 persen dari total belanja APBD. Fasilitas kesehatan pun menjadi rujukan di wilayah Cirebon bahkan hingga sebagian Jawa Tengah. Sebagai kota transit, sebenarnya Kota Cirebon rawan terhadap masalah kesehatan yang ditimbulkan dari perpindahan manusia dan barang. Kasus flu burung, demam berdarah, serta HIV AIDS yang semakin meningkat diantaranya adalah konsekuensi dari kota transit. Gizi buruk menjadi masalah di bidang kesehatan dasar yang diantaranya terjadi di kalangan keluarga miskin. Penanganan kesehatan keluarga miskin pun menjadi persoalan karena banyaknya warga yang menurut persepsi masyarakat tergolong miskin namun belum terdata sebagai keluarga miskin. Kota Cirebon telah menerbitkan Kartu Cirebon Menuju Sejahtera (KCMS) namun karena dianggap belum mengakomodir keinginan masyarakat untuk masuk dalam data maka program ini kemudian dianggap tidak berhasil. Persoalan lainnya di bidang kesehatan adalah soal layanan rumah sakit umum daerah yang seringkali mendapat komplain dari masyarakat. Keluhan dari keterlambatan dokter, penanganan di unit gawat darurat, kekurangan fasilitas dan peralatan adalah sebagian dari persoalan pelayanan kesehatan rujukan.
* Secara data statistik proporsi keluarga miskin di Kota Cirebon sebenarnya cenderung turun. Namun hasil pendataan BPS ini belum dapat digunakan sepenuhnya untuk program-program penanggulangan kemiskinan. Hasil pendataan kemudian dianggap belum mewakili masyarakat miskin yang dipersepsikan sendiri oleh masyarakat. Usulan data keluarga miskin yang diminta untuk diverifikasi sudah mencapai angka hampir 30 ribu kepala keluarga. Sementara data KCMS sendiri berjumlah hampir 18 ribuan kepala keluarga. Persoalan yang kemudian terjadi terutama dalam pelayanan kesehatan keluarga miskin. Oleh karena itu masih terjadi dua alternatif penggunaan data yang berasal dari KCMS dan yang berasal dari SKTM (untuk yang belum terakomodir). Kecenderungan yang terjadi adalah rata-rata masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan meminta bantuan untuk memperoleh layanan kesehatan gratis.
* Sebagai kota yang menjadi pusat kegiatan di wilayah cirebon, investasi yang berkembang sangatlah tinggi. Hal ini berdampak pada peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal. Namun jika dilihat dari data Tingkat Paritisipasi Angkatan Kerja (TPAK), yang meskipun semakin meningkat setiap tahunnya, tetapi masih menyisakan jumlah yang cukup besar yang tidak terserap atau tidak bisa bekerja. Angka TPAK terakhir tahun 2011 berjumlah 55,07 persen yang berarti masih ada sekitar 44,93 persen yang belum tersalurkan.
* Kota Cirebon menjadi daya tarik utama penduduk di wilayah sekitarnya, sehingga penduduk commuter menjadi fenomena yang terjadi di Kota Cirebon. Meskipun belum ada data statistik yang pasti namun diperkirakan jumlah penduduk siang hari yang berada di Kota Cirebon hampir tiga kali lipat dari jumlah penduduk yang tinggal di Kota Cirebon. Yang kemudian menjadi persoalan adalah penduduk commuter yang bekerja di sektor informal atau mereka yang termasuk dalam golongan penyandang masalah sosial. Lazim sering terlihat banyak pengemis atau anak jalanan yang berada di perempatan atau lampu merah yang sebenarnya mereka berasal dari sekitar wilayah Kota Cirebon. Begitupula dengan sektor informal. Berdasarkan data salahsatu LSM di Kota Cirebon, terdapat sekitar 6000 PKL yang berjualan di Kota Cirebon dan 20 persen diantaranya berasal dari sekitar wilayah kota. Pertumbuhan sektor informal cukup pesat seiring dengan pertumbuhan investasi di Kota Cirebon. Keberadaan mall dan pusat perbelanjaan secara tidak langsung menarik sektor informal pula. Secara ekonomi sektor ini menjadi alternatif peluang mengatasi pengangguran sekaligus menjadi ruang ketahanan ekonomi saat masyarakat didera krisis keuangan. Namun dari sisi estetika, ruang kota keberadaan PKL yang memanfaatkan ruang publik tentunya menimbulkan konflik karena mereka yang memiliki hak menggunakan ruang publik menjadi terkurangi dengan keberadaan PKL tersebut.
* Sebagai Kota dengan peninggalan warisan budaya khas keraton yang masih ada di Propinsi Jawa Barat, Kota Cirebon tentunya kaya dengan peninggalan budaya khas. Pelestarian budaya dan peninggalan masa lampau yang menjadi ciri khas Kota Cirebon membutuhkan sumber daya yang tidak sedikit. Proporsi pendanaan untuk pelestarian masih minim dari APBD karena memang anggaran yang tersedia sangat terbatas. Sementara insentif dan disinsentif terkait dengan pelestarian budaya belum pernah di lakukan. Keterlibatan pihak di luar pemerintah dalam pelestarian budaya ini masih minim.
* Sebagai kota dengan karakteristik urban yang sangat kentara dan jalur lintas Jawa Barat dan Jawa Tengah, tingkat kriminalitas di Kota Cirebon cenderung mengalami peningkatan. Daya tarik kota dengan segala fasilitas di dalamnya dan masyarakat yang terkotak-kotak antara modern dan kumuh tidak pelak menimbulkan kecemburuan sosial. Di lain pihak sepertinya aspek gotong royong, kebersamaan, saling menghargai dan menghormati cenderung luntur lantaran masyarakat menjadi semakin individualis. Hal ini dapat dilihat dari gerakan siskamling yang semakin hari semakin diserahkan kepada petugas keamanan warga saja. Warga cukup membayar iuran bulanan saja dan menyerahkan sepenuhnya aspek keamanan kepada pihak tertentu saja. Sudah waktunya masyarakat berperan aktif dalam menjaga kondisi keamanan dan ketentraman warga di sekitarnya.
* Kota Cirebon memiliki luas wilayah untuk pertanian dan perkebunan yang relatif kecil. Dari sisi produk domestik regional bruto, sektor pertanian menyumbang kontribusi kurang dari setengah persen. Namun begitu, nilai PDRB berdasarkan harga konstan cenderung mengalami peningkatan. Ini berarti bahwa potensi Kota Cirebon dalam hal ketahanan pangan dinilai dapat memadai meskipun nilainya kecil. Permasalahan yang kemudian muncul dari aspek ketahanan pangan adalah alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan menjadi lahan terbangun.

**4.1.3 Aspek Ekonomi Keuangan**

* Kota Cirebon memiliki daya tarik investasi yang cukup tinggi, hal ini dapat dilihat dari sisi nilai penanaman modal yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sekitar tahun 2000 an Kota Cirebon pernah dinobatkan sebagai kota dengan tujuan investasi nomor 1 di Indonesia, namun seiring dengan perkembangan zaman, Kota Cirebon menempati rangking terakhir dalam data Transparansi Internasional Indonesia sebagai kota terkorup yang salahsatu penilaiannya adalah dari iklim investasi. Selama tahun 2010 – 2012 banyak investor mengeluhkan sulitnya perizinan penanaman modal di Kota Cirebon. Hal ini terjadi karena dokumen hukum yang menjadi dasar perizinan belum dapat disahkan. Dokumen tersebut (RTRW) akhirnya disahkan pada pertengahan tahun 2012 sehingga daftar investor yang menunggu kepastian izin dapat diproses. Meskipun begitu proses perizinan masih menghadapi tantangan seperti persoalan penyederhanaan perizinan, insentif dan disinsentif investasi, dan penerapan sanksi pelanggaran tata ruang.
* Pembangunan koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi yang besar dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat. Peranan koperasi sebagai sokoguru perekonomian dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terbukti lebih mampu bertahan dalam menghadapi krisis ekonomi. Permasalahan yang kemudian muncul dalam sektor usaha kecil menengah dan koperasi adalah kualitas SDM pengelola koperasi/UMKM masih rendah, Inovasi dan adopsi teknologi, pengembangan disain produk, yang berdampak pada diversifikasi produk masih rendah, keterbatasan jaringan pasar industri kecil dan kemitraan, serta akses modal.

**4.1.4 Aspek Pemerintahan**

* Pelaksanaan Otonomi Daerah sejak tahun 2001 belum seperti yang diharapkan. Otonomi Daerah mengandung makna mengatur segala sesuatunya secara mandiri, baik pengelolaan pemerintahan maupun pembiayaannya. Namum pada kenyataannya Pemerintah Kota masih tergantung pada kebijakan-kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal pembiayaan pembangunan dan pengaturan sumberdaya aparatur. Beberapa permasalahan yang kemudian terjadi pada aspek pemerintahan adalah :

1. Potensi keuangan daerah belum tergali secara optimal;
2. Pengadaan pegawai belum sesuai antara formasi riil dengan formasi pegawai yang ditetapkan Pemerintah;
3. Kompetensi sebagian pegawai belum sesuai dengan kebutuhan riil;
4. Penegakan hukum belum efektif;
5. Produk hukum daerah masih banyak yang tidak sesuai dengan perkembangan keadaan;
6. SKPD belum semua memiliki Standar Pelayanan Minimal dan Prosedur Standar Operasional;
7. Pelayanan perijinan belum optimal;
8. Pelimpahan kewenangan kepada kecamatan belum optimal;
9. Hasil-hasil pengawasan belum sepenuhnya menjadi input perencanaan pembangunan.
10. Indeks persepsi Korupsi Kota Cirebon yang belum memenuhi standar.
11. Penilaian BPK masih dalam taraf Wajar Dengan Pengecualian (WDP)
12. Optimalisasi kerjasama antar daerah.
13. Optimalisasi aset dan perusahaan daerah.
14. Peningkatan kualitas hubungan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
    1. **Isu Strategis**

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu trategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

**4.2.1 Aspek Fisik dan Lingkungan**

**a. Lingkungan Hidup**

Pembangunan harus menempatkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai kriteria utama dalam setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Beberapa isu dalam urusan Lingkungan Hidup yang harus menjadi perhatian adalah

1. Pengendalian pencemaran lingkungan meliputi pengendalian pencemaran air (air tanah dan air permukaan), serta pengendalian pencemaran udara dan kebisingan
2. Pengendalian kerusakan lingkungan meliputi :

* Pengendalian erosi, Abrasi dan akresi pantai,
* Pengendalian penurunan muka tanah (deplesi) dan intrusi air laut,

1. Penanggulangan Dampak Perubahan Iklim

Perubahan iklim merupakan fenomena alam yang memberikan dampak pada peningkatan kerentanan wilayah Kota Cirebon yang merupakan kota dengan kondisi topografi berupa dataran rendah dan pesisir. Selain itu, perubahan iklim akan meningkatkan potensi dan kemungkinan terjadinya kejadian-kejadian iklim ekstrim dan bencana hidrometrologis seperti banjir rob. Dampak lain dari perubahan iklim juga akan mempengaruhi kondisi kehidupan masyarakat miskin perkotaan terutama yang tinggal di kawasan pesisir. Untuk itu, diperlukan upaya-upaya adaptasi untuk meningkatkan ketahanan masyarakat dalam menghadapi perubahan iklim. Dalam mewujudkan hal ini dilakukan melalui peningkatan kualitas kelembagaan, sumber daya manusia, dan tata laksana meliputi peningkatan kapasitas dan kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat, pengembangan data dan informasi terkait dengan kondisi iklim dan rancang ulang seluruh aspek-aspek program pembangunan sehingga bersifat adaptif dan responsif terhadap perubahan iklim.

1. Penanggulangan Bencana

Berbagai potensi bencana hampir dapat dipastikan selalu mengancam Kota Cirebon. Berbagai potensi bencana tersebut antara lain banjir (termasuk rob dan genangan), tanah longsor,pohon tumbang dan kebakaran. Perlu upaya peningkatan mitigasi bencana khususnya bagi masyarakat untuk mengurangi resiko korban jiwa dan kerugian materi yang lebih besar.

1. Pengelolaan Sampah

Dalam sektor kebersihan, faktor-faktor yang menjadi isu antara lain :

a. volume atau laju timbulan sampah yang setiap tahun meningkat

b. pola pelayanan yang masih menggunakan pola lama yaitu kumpul, angkut, buang

c. regulasi dan penegakan hukum yang masih lemah

d. peran serta masyarakat yang masih harus ditingkatkan

e. Keterbatasan Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir (TPPA) Sampah

**b. Pekerjaan Umum**

Infrastruktur wilayah termasuk jalan beserta saluran draenasenya dan jembatan, serta prasarana sumberdaya air dan jaringannya yang cukup dan baik memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan peluang positif bagi pertumbuhan ekonomi maupun kehidupan sosial budaya suatu daerah. Pembangunan dan upaya peningkatan serta sektor pekerjaan umum sudah dilakukan selama ini, namun tetap menjadi perhatian serius di masa mendatang. Pada tahap 2013-2018 ini diperlukan upaya untuk memecahkan permasalahan-permasalahan terkait dengan urusan pekerjaan umum yang perlu mendapat perhatian diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Pengendalian banjir dan antisipasi pasang laut/rob Banjir, rob, dan genangan merupakan ancaman bencana yang menjadi isu yang harus diprioritaskan penanganannya. Bencana tersebut diakibatkan oleh banjir kiriman, hujan lokal, dan kenaikan muka air laut. Penanganannya masing-masing berbeda namun harus menjadi satu kesatuan strategi.
2. Tingginya tingkat kerusakan jalan, termasuk saluran drainase dan prasarana jalan
3. Masih terbatasnya prasarana jalan di Wilayah Selatan (Kelurahan Argasunya), perlu upaya untuk dapat memperlebar jembatan tol yang ada sehingga lebih refresentatif.
4. Masih terbatasnya ketersediaan infrastruktur sumberdaya air di wilayah selatan (kelurahan Argasunya),
5. Ketergantungan pada sumber air Paniis sebagai sumber air baku PDAM Kota Cirebon yang melayani kebutuhan air bersih skala Kota

**c. Penataan Ruang**

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Cirebon 2011-2031 maka salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah mengoptimalkan dan mengoperasionalkan pengendalian pemanfaatan ruang dalam rangka mewujudkan ruang kota yang berkualitas.

Penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya akan dapat berjalan baik bilamana aturan mainnya dapat ditegakkan secara konsisten dan terkendali dalam situasi pembangunan yang semakin menggeliat. Oleh karena itu, beberapa permasalahan terkait urusan penataan ruang yang perlu menjadi perhatian pada periode tahun 2013-2018 diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Diperlukan peraturan daerah terkait aspek-aspek pengendalian ruang seperti rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi, perangkat hukum (sanksi), perizinan dan insenti-disinsentif yang dapat menjadi acuan dalam membangun ruang kota.
2. Diperlukan langkah strategis untuk memenuhi ketersediaan ruang terbuka hijau sebesar 30% per satuan luas wilayah yang secara ekologis berfungsi untuk meningkatkan kualitas air tanah, mencegah banjir, mengurangi polusi udaha dan pengatur iklim mikro, selain fungsi sosial ekonomi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan landmark. untuk Pemanfaatan dan Pengendalian ruang masih belum optimal;

**d. Perumahan**

Perumahan dan permukiman yang baik seharusnya memiliki infrastruktur dasar yang baik agar tercipta lingkungan yang sehat sebagai penunjang dalam aktivitas sosial dan ekonomi. Infrastruktur tersebut antara lain air bersih, sanitasi, jalan lingkungan, kelayakan kondisi rumah dan lingkungan permukimannya. Beberapa permasalahan terkait urusan perumahan yang perlu menjadi perhatian diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan ketersediaan prasarana penunjang permukiman sehat seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air limbah dan air hujan, ketersediaan air bersih, dan ketersediaan ruang publik.
2. Masih terdapat beberapa wilayah yang masuk dalam kategori kumuh
3. Perlunya penataan dan pengembangan rumah susun sewa bagi masyarakat berpenghasilan rendah akibat keterbatasan lahan dan tingginya nilai lahan
4. Perlu optimalisasi penataan Tempat Pemakaman Umum .

**e. Perhubungan**

Permasalahan pembangunan urusan perhubungan pada periode tahun 2013-2018 yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah .

1. kemacetan lalu lintas yang diakibatnya oleh padatnya kendaraan juga prediksi kemacetan akan semakin meningkat seiring dengan berfungsinya duo double track kereta api yang melintasi Kota Cirebon
2. kondisi kuantitas dan kualitas angkutan umum yang memerlukan pembenahan,**;**
3. Tingkat keselamatan berlalu lintas yang harus ditingkatkan
4. perlunya moda transportasi massal yang nyaman dan representatif,
5. keterbatasan fasilitas sarana dan prasarana perparkiran.

**f. Komunikasi dan Informasi**

Permasalahan pembangunan urusan komunikasi dan informasi pada periode tahun 2013-2018 yang perlu mendapat perhatian antara lain adalah :

1. Keterbukaan informasi publik
2. Perkembangan Teknologi Informatika (E-Gov dan E-city)

**g. Pertanahan**

Tertibnya administrasi pertanahan merupakan salah satu indikator kepastian kepemilihan lahan. Permasalahan yang masih perlu mendapatkan perhatian pada periode tahun 2011-2015 untuk urusan pertanahan, sebagai berikut.

1. Belum tuntasnya penetapan batas wilayah dengan kabupaten.
2. Administrasi kepemilikan tanah termasuk asset tanah pemerintah daerah belum tertib.

**h. Energi dan Sumberdaya Mineral**

Permasalahan terkait urusan Energi dan Sumberdaya Mineral yang perlu mendapatkan perhatian diantaranya adalah sebagai berikut.:

1. Belum optimalnya pengawasan, penertiban dan penegakan hukum terhadap penambangan galian C liar
2. Belum optimalnya elektrifikasi rumah tangga.

**4.2.2 Aspek Sosial Budaya**

a. Kesehatan

* Perubahan iklim global menyebabkan terjadinya perubahan iklim dan guna lahan secara lokal yang berdampak terhadap menurunnya kualitas kesehatan lingkungan. Penyakit-penyakit yang terjadi akibat perubahan iklim cenderung meningkat dan memerlukan penanganan lebih lanjut. Upaya preventif perlu dilakukan sejak sekarang dengan mengembalikan dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan sekitar diantaranya dengan meningkatkan standar kualitas sanitasi masyarakat.
* Dengan meningkatnya karakteristik urban yang ditandai dengan pesatnya pertumbuhan pusat-pusat perbelanjaan dan pusat aktifitas kota, akan mengakibatkan bertambahnya jam kerja seseorang. Hal ini menyebabkan meningkatnya ketergantungan masyarakat terhadap makanan yang siap saji atau makanan yang disajikan di luar rumah. Data yang ada menunjukkan kecenderungan meningkatnya penyakit tidak menular pada masyarakat kota termasuk Kota Cirebon. Hal ini menunjukkan terjadi transisi penyakit epidemiologi dari penyakit menular ke tidak menular. Hal penting yang perlu dilakukan diantaranya dengan Upaya kesehatan masyarakat promotif dan preventif dengan menjalankan kuratif dan rehabilitatif

b. Pendidikan

* Sebagai daerah yang telah menganggarkan anggaran pendidikan lebih dari 20 persen, Kota Cirebon termasuk yang memiliki angka indeks pendidikan tertinggi se wilayah Ciayumajakuning. Rata-rata lama sekolah mendekati 10 (sepuluh) tahun, namun ini masih jauh dari target rata-rata lama sekolah Kota Cirebon yaitu 12 tahun. Angka putus sekolah terutama untuk tingkat SMA masih jauh dari harapan sementara untuk tingkat SD dan SMP sudah sesuai target. Salah satu aspek penting untuk menurunkan angka putus sekolah adalah dengan mengalokasikan biaya operasional sekolah hingga tingkat SMA.
* Untuk mengejar ketertinggalan dan mempertahankan rata-rata lama sekolah yang ada, maka perlu dicanangkan wajib belajar bukan hanya hingga 12 tahun tetapi hingga 15 tahun sehingga rata-rata tingkat pendidikan masyarakat Kota Cirebon adalah setingkat SMA. Selain itu untuk membantu masyarakat Kota Cirebon yang akan melanjutkan jenjang pendidikan menengah ke pendidikan tinggi, pemerintah kota perlu mengalokasikan anggaran untuk beasiswa perguruan tinggi bagi warag kota yang akan melanjutkan pendidikan terutama untuk kalangan tidak mampu.
* Isu strategis lainnya di bidang pendidikan mencakup mutu tenaga pendidik yang diharapkan selama lima tahun ke depan 90 persen tenaga pendidik di Kota Cirebon telah bersertifikasi.

c. Sosial

* Salahsatu isu strategis di bidang sosial adalah soal kemiskinan. Angka kemiskinan yang masih cukup tinggi, pendataan yang masih belum seragam menjadi salah satu kendala dalam pengentasan kemiskinan terutama dalam pelayanan kesehatan keluarga miskin. Dengan diterapkannya Sistem Jaminan Sosial Nasional mulai tahun 2014 maka perlu ditingkatkan upaya-upaya untuk mendukung pemberlakuan program tersebut.
* Angka pengangguran yang cukup tinggi perlu upaya peningkatan keahlian dan keterampilan masyarakat, selain terkait pula dengan tingkat pendidikan. Peningkatan daya saing masyarakat Kota Cirebon perlu dilakukan mengingat pada tahun 2015 akan diterapkan Asean Free Trade.
* Sebagai salah satu kota dengan lahan yang minim pertanian dan perkebunan, maka aspek ketahanan pangan bagi Kota Cirebon menjadi penting. Oleh karena itu perlu diupayakan perlindungan terhadap kawasan-kawasan produktif pertanian agar tidak beralih fungsi menjadi lahan non pertanian.

d. Perlindungan anak dan perempuan

* Isu strategis dalam perlindungan anak dan perempuan adalah perlunya membangun pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak, serta pentingnya pemahaman pengarusutamaan gender, terutama dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan.
* Isu strategis lainnya dalam perlindungan anak dan perempuan adalah perlunya membangun kesadaran mulai dari tingkat bahwa terutama di tingkat RT atau RW. Hal ini dapat dilakukan dengan upaya membuat kawasan percontohan RW ramah anak atau RT ramah anak. Selain itu di tempat-tempat yang merupakan fasilitas umum perlu diupayakan pula untuk menjadi ramah anak misalnya di terminal dan stasiun Kereta Api.

**4.3.3 Aspek Ekonomi Keuangan**

Beberapa isu strategis dalam bidang ekonomi keuangan adalah :

1. Perlunya penyederhanaan perizinan, insentif dan disinsentif investasi, dan penerapan sanksi pelanggaran tata ruang, hal ini terkait dengan investasi yang berkembang semakin pesat di Kota Cirebon.
2. Peningkatan daya saing koperasi dan UMKM, terutama dengan melibatkan lingkungan alternatif misalnya pondok pesantren, mesjid, dan kelompok pemuda.
3. Penanganan sektor informal terutama pedagang kaki lima dengan mengalokasikan ruang, baik yang sudah dimiliki atau membebaskan baru untuk keberadaan PKL dalam rangka pembinaan sektor informal menjadi formal.
4. Pelestarian budaya dan aset wisata daerah terutama dengan banyaknya potensi wisata ziarah dan berbasis keIslaman di Kota Cirebon.
   * 1. **Aspek Pemerintahan**
5. Dalam rangka mendukung kinerja Pelayanan Pemerintahan Kota Cirebon diperlukan iklim yang kondusif sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat terlibat dan berperan serta secara optimal. Iklim kondusif hanya dapat dicapai bila suasana lingkungan terbebas dari berbagai gangguan keamanan dan konflik sosial yang berkepanjangan. Untuk itu, diperlukan penegakan hukum, pengendalian ketentraman dan ketertiban yang konsisten sehingga kondisi aman, tentram, tertib dan teratur. Selain itu, diperlukan juga strategi dan langkah-langkah antisipasi mitigasi bencana termasuk potensi terjadinya kebakaran. Kondisi yang tentram dan tertib dapat dicapai melalui kerjasama pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui penguatan kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur dan tata laksana yang handal.
6. Untuk mendukung kinerja Pemerintahan Kota Cirebon, diperlukan pembiayaan pembangunan yang signifikan. Walaupun dari tahun ke tahun APBD Kota Cirebon cenderung meningkat namun belum mampu membiayai pembangunan secara keseluruhan sesuai kebutuhan. Seiring dengan penerapan prinsip g o o d g o v e r n a n c e , akuntabilitas keuangan daerah kondisinya semakin baik sehingga dimungkinkan untuk menggali potensi pembiayaan non- konvensional. Pembiayaan pembangunan non-konvensional dilakukan melalui peran serta masyarakat dan dunia usaha yang proporsional untuk mendukung pembiayaan pembangunan melalui penerbitan surat berharga (obligasi), skema Public Private Partnership (PPP), maupun C o r p o r a t e S o c ia l R e s p o n s ib ilit y (CSR), serta skema lainnya dengan memprioritaskan pembiyaaan pembangunan infrastruktur. Dalam pelaksanaannya, diperlukan dukungan penguatan kelembagaan, sumber daya manusia dan tata laksana yang handal.
7. Pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik. Untuk itu, pemerintah harus melakukan reformasi birokrasi dan memfokuskan pada spek kelembagaan, aparatur, dan tata laksana dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance. Pengembangan reformasi birokrasi harus dilakukan bersamaan dengan reformasi pada bidang-bidang lain misalnya reformasi badan usaha daerah dan swasta serta lembaga- lembaga lainnya agar terjalin sinergi yang saling menguntungkan dan bermanfaat.
8. Terkait dengan indeks persepsi korupsi yang masih belum memenuhi standar, maka diperlukan upaya konsisten untuk melaksanakan dokumen Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) yang telah disahkan melalui Peraturan Walikota Cirebon Nomor 56 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD PK) Kota Cirebon 2012 – 2017. Selain upaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksaaan peraturan walikota tersebut.